PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 01 November 2024 Halaman: 2

MARWOTO HADI, FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA YOGYA

Tegas Kawal Realisasi SPBE untuk Reformasi Birokrasi

DPRD KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirilis sejak tahun 2018 melalui PP 95/2018. Pada saat itu Pemkot Yogya juga merilis aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai sebuah platform digital pelayanan publik.

Pertanyaannya apakah kemudian amanat SPBE selesai sekadar dengan diberlakukannya atau adanya JSS? Kalau dilihat dari ruang lingkup SPBE yakni rencana induk, proses bisnis, anggaran dan belanja serta sistem data dan informasi elektronik, maka perlu dikaji dalam implementasinya. Pertama, apakah sudah ada regulasi yang mengatur desain dan tata laksana dalam bentuk perda? Jawabannya, eksekutif dan legislatif sudah membuat perda tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK. Kenapa harus perda, karena regulasi ini merupakan penganamatan yang paling kuat dan 'wajib dilaksanakan' yang kemudian akan memberikan landasan pada aspek anggaran, SDM dan arah kebijakan teknisnya.

Kedua, terkait tata kelola informasi dan data elektronik. Sejauh mana Pemkot benar-benar serius terhadap kebijakan satu data Indonesia, statististik sektoral dan prinsip 'perencanaan berbasia data'. DPRD Kota Yogya melalui Komisi A sudah sedemikian aktif menyuarakan tentang hal itu.

Kedua pertanyaan tersebut penting karena berbicara SPBE ini adalah tentang bagaimana reformasi birokrasi benar-benar memiliki arah yang jelas serta berdampak bagi efektivitas pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan. Meskipun dalam prakteknya masih banyak kekurangan di sana-sini namun pada OPD level dinas dan badan mungkin isu-isu SPBE sudah menjadi diskusi yang familiar dan kemudian berproses pada penguatan SDM.

Tetapi pada level pemerintahan di tingkat bawah seperti kemantren dan kelurahan diskusinya masih sangat sederhana yakni pada isu SDM. Sudahkan pada level ini tersedia SDM yang mengawal? Sebaik apapun suatu konsep kebijakan tetapi tidak tersedia SDM yang memadai maka bisa diyakini bahwa kebijakan tersebut hanya akan berhenti sebagai suatu angan-angan. DPR sebagai mitra sekaligus fungsi kontrol pemerintah sepakat untuk mendorong SPBE ini benar-benar dilaksakan secara serius. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005